



Pemerintah Kabupaten Nunukan

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran AllahNya atas Hidayah dan Karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini dapat selesai.

Dokumen Rencana Kerja dinas kependudukan dan catatan sipil ini memuat informasi perencanaan, program dan kegiatan serta rencana anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nunukan pada Tahun 2026 yang mendukung pembangunan Kabupaten Nunukan khususnya peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Akhir kata, diharapkan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan Perencanaan Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Nunukan, Juli 2025

Kepala Dinas



[Signature]
AGUSTINUS PALENTEK, SS
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19670606 200003 1 009



DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	13
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	16
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	26
	3.3 Program dnn Kegiatan	27
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB V	PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis ke arah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan.

Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang fleksibel, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan berbagai tantangan yang pada hakekatnya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, sehingga mampu mendorong semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, pengendalian penduduk komuter, pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kependudukan.

Perencanaan Strategis pada dasarnya merupakan langkah awal serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun bersama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai visi dan misi sesuai dengan analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan strategis seperti kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) dan faktor-faktor sumber daya (resources) serta karakteristik kabupaten Nunukan.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.



Renja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan (strategis) regional dan nasional serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

Renja juga merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang yang berkait pula dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan terlegitimasi.

Urgensinya renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dikarenakan pada dasarnya renja mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

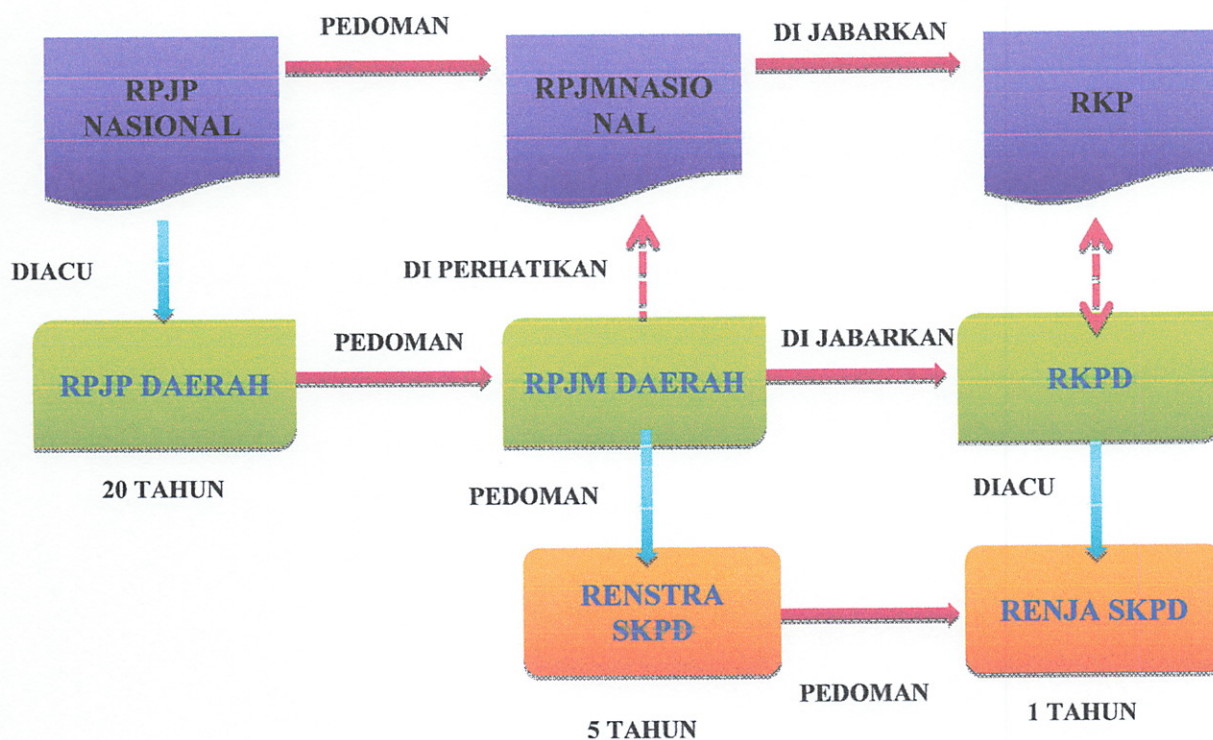
1. sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional program analisis dan mobilisasi sumberdaya;
2. sebagai media untuk mengkomunikasikan tujuan, visi, program dan kebutuhan sumberdaya dengan mitra kerja (*stakeholder*) ;
3. untuk menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan sumberdaya dalam melaksanakan analisis dan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan ;
4. sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan; dan
5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Renja dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan di bidang Kependudukan.

Penyusunan renja ini telah melalui beberapa proses dari mulai persiapan hingga penetapannya yang melibatkan seluruh pimpinan unit atau Kepala Seksi/Sub Bagian yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Proses awalnya adalah dengan melakukan analisa terhadap isu-isu strategis dari masing-masing seksi sampai menghasilkan harapan yang ingin dicapai dari setiap seksi yang pada akhirnya dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan. Proses penyusunan ini awalnya dilakukan oleh masing-masing seksi. Hal ini ditempuh mengingat dikarenakan karakteristik antar unit kerja yang ada sangat berbeda dan sangat jarang berhubungan langsung antar satu dengan yang lainnya.

Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021 -2026 & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026. dan selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang dibuat setiap tahunnya

KETERKAITAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- 2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Administrasi Kependudukan;
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) Kabupaten Nunukan tahun 2023 dimaksudkan sebagai dasar dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 1 (Satu) tahun mendatang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan .



**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 Perangkat Daerah.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022, secara fisik terlaksana sebesar 98 %, dan realisasi keuangan sebesar 92,43%. Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2025 yang telah dituangkan dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun anggaran 2023,

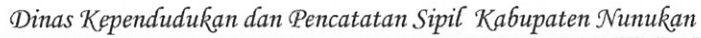


Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Disdukcapil Kabupaten Nunukan

Kode rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Keg Tahunn 2023	Perkiraan Capaian	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rens
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	69,5 %		68,5 %					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100		100	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	6 Laporan	



					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1Laporan	1Laporan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang/bulan		35 orang/bulan	35 orang/bulan	100,00 %	35 orang/bulan	35 orang/bulan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%	100%	80	80	80	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	100,00 %	1 Paket	10 Paket	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		10 Paket	9 Paket	90	3 Paket	9 Paket	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	3 Paket		3 Paket	2 Paket	85	3 Paket	2 Paket	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	2 Paket	100,00 %	5 Paket	2 Paket	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100	20 Laporan	50	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100%		100%		100	100		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	



						Disediakan											
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang perangkat daerah yang dipelihara.	100%		100%		90						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit		7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		7 Unit	6 Unit	75	5 Unit	5 Unit				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit				
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yg memiliki KIA	85 Persen		45 Persen	52,91	117,57	52,91	62,25				
						Persentase kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Nunukan	100 Persen		97 Persen		102,31		99,24				
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4 jenis		4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	100				
					Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen				
					Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan HASIL Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan				
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dok Atas Dafduk						25.200 dok	19.323 dok				



					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100	
					Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	0	0	
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Abak Usia 0-18 th yang memiliki Akta Kelahiran	0 %		92 %					
						Jumlah Anak Usia 0-18 th yang memiliki Akta Kelahiran	100 %		92 %	97,07		97,07	97,07	
						Presentase Penerbitan Akta Perkawinan atas peristiwa perkawinan yang dilaporkan	100 %		100 %	100		100	100	
						Presentase Penerbitan Akta Kematian atas peristiwa kematian yang dilaporkan	100 %		100 %	100		100	100	
					Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan	4 jenis		4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8.000 dok					6.000 dok	6.910 dok	
					Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	100	21 Laporan	21 Laporan	
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									
					Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	
					Sosisalisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Admuduk melalui PKS	5 OPD		5 OPD	1 Lap, 1 opd	80%	1 Lap, 1 opd		
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian	5 OPD		1 dok	1 dok	60	1 dok, 1 OPD		



					Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Buku Data Kependudukan	1 dok		1 dok	1 dok	100,00 %	1 dok	1 Dok	
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jmlah OPD	5 OPD		5 OPD	1 OPD	20	1 OPD	1 OPD	
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang dapat mengelolan informasi adminduk	5 OPD		5 OPD	5 opd	100	5 opd	100	
					Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Penduduk Tk Kabupaten	100 Persen		100 Persen			100		
					Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Laporan Informasi Kependudukan			1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
					Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	"Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain"	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025 SAMPAI DENGAN AKHIR TRIWULAN I**

Nama OPD : Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja PD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Akhir Triwulan I Tahun 2025		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Akhir Triwulan I Tahun 2025	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
	Bidang Urusan Perencanaan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah			69,00	7,125,208,461.00			Persen	0.00



Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang berkualitas			5 dokumen	59,590,160.00			dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	59,590,160.00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	33.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	45,786,090.00	0 Laporan	-	Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	78,063,230.00	3 Laporan	-	Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan			1	5,043,394,519.00			unit	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang/bulan	5,043,394,519.00	34 Orang/bulan	1,839,050,789.00	97.1 Orang/bulan	36.46
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian			1 Unit	65,186,000.00			unit	



Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang	65,186,000.00	0 Orang	-	Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum			1	705,733,420.00			unit	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4,720,320.00	0 Paket	-	Paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	343,490,000.00	0 Paket	-		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	99,000,800.00	1 Paket	-	Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	8,506,300.00	1 Paket	-	Paket	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	250,016,000.00	4 Laporan	16,657,200.00	20.0 Laporan	6.66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang			1	937,331,312.00		215,527,665.00	unit	



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	3,200,000.00	0 Laporan	-	Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	404,286,000.00	3 Laporan	36,767,665.00	25 Laporan	9.1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	529,845,312.00	3 Laporan	178,760,000.00	25 Laporan	33.1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD			Unit	313,973,050.00			unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 Unit	103,073,050.00	0 Unit	-	Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	10,900,000.00	0 Unit	-	Unit	



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	200,000,000.00	0 Unit	-	Unit	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP el Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yg Memiliki KIA			100 75	636,185,790.00			Persen	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilakukan			4 Jenis	597,027,120.00			Jenis	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			3 Dokumen	43,125,000.00	0 Dokumen	-	Dokumen	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			3 Laporan	553,902,120.00	0 Laporan	-	Laporan	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			1 Laporan	39,158,670.00			Laporan	
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	39,158,670.00	0 Laporan	-	Laporan	



PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran			98%	284,796,940.00			Persen	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan			4 Layanan	201,926,190.00			Jenis	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			21 Layanan	201,926,190.00	5 Layanan	21,830,000.00	Layanan	10
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			1 Laporan	82,870,750.00			Laporan	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil			1 Laporan	40,053,750.00	0 Laporan	-	Laporan	
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			1 Laporan	42,817,000.00	0 Laporan	-	Laporan	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang memanfaatkan data administrasi kependudukan melalui PKS			5 OPD	375,413,300.00			OPD	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Data Kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian data base kependudukan yang akurat			1 laporan	148,599,300.00			Laporan	



Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			1 Dokumen	25,011,130.00	0 Dokumen	-	Dokumen	
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			5 Dokumen	123,588,170.00	0 Dokumen	-	Dokumen	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel			1 Laporan	226,814,000.00			Laporan	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 Laporan	141,814,000.00	0 Laporan	6,441,000.00	Laporan	
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 Laporan	85,000,000.00	0 Laporan	-	Laporan	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			3	70,463,850.00			unit	



Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			1 Laporan	70,463,850.00	0 Laporan	-	Laporan	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data penduduk tingkat kabupaten			100	18,232,500.00			persen	
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil kependudukan			1	18,232,500.00			dokumen	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	9,982,500.00	0 Dokumen	-	Dokumen	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			1 Dokumen	8,250,000.00	0 Dokumen	-	Dokumen	



2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.2.1 Indikator Nilai Indeks kepuasan Masyarakat

Nilai indeks kepuasan masyarakat diperoleh dengan melakukan survey kepuasan masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan. Target nilai IKM tahun 2022 adalah 87,5 %, dan nilai IKM yang diperoleh pada semester I adalah 90,84 dan nilai IKM semester II 91,24

2.2.2 Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Persentase Cakupan kepemilikan dokumen administrasi diperoleh berdasarkan nilai rata-rata dari persentase kepemilikan KTP elektronik , persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran , persentase penerbitan akta kematian tahun, persentase penerbitan akta perkawinan tahun, dan persentase Anak usia 0 – 17 kurang 1 hari yang memiliki KIA.

Pada tahun 2022 target cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan adalah 92 % dari jumlah penduduk dan realisasi kepemilikan 89,84 %, ini berarti capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan telah berhasil dengan tingkat capaian 97,65%

2.2.3 Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Target PKS Jumlah PD yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2022 adalah 20 % dari 29 jumlah seluruh PD di Kabupaten Nunukan. Realisasi PKS pada tahun 2022 adalah 6 PD, atau 20 % dari jumlah PD yang berada di Kabupaten Nunukan. Ini berarti capaian indikator telah mencapai 100 %



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil
Kabupaten Nunukan

NO.	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kependudukan	87,5%	88,0%	88,2%	88,5%	91,24,5%		88,2%	88,5%	
	Persentase CakupanKepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92%	94%	96%	98%	97,6%		96%	98%	
	persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	20%	30%	40%	50%	20%		40%	50%	
	Predikat SAKIP PD	B	B	B	B	CC		B	B	



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada point-point sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis . Isu – isu strategis ditentukan dengan metode Forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh Pejabat struktural yang membidangi teknis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, kemudian merumuskan isu – isu strategis yang telah dianalisa dan memiliki korelasi dengan permasalahan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka ditentukan isu – isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan oleh DKPS
2. Belum optimalnya akses Informasi tentang Administrasi Kependudukan;
3. Masyarakat daerah pedalaman dan terisolir sulit mendapatkan pelayanan Adminduk;
4. Belum optimalnya Penyajian data kependudukan;
5. Belum optimalnya Pemanfaatan data kependudukan; dan
6. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 27

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan 2024

Dinas Kependudukan dan Ppencatatan sipil

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Catatan penting
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.434.321.464		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.434.321.464		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	68,50 Nilai	5.094.253.560		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	68,50 Nilai	5.094.253.560		
<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	3 Dokumen	71.370.705		<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	3 Dokumen	71.370.705		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.803.094		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.803.094		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	28.567.611		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	28.567.611		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000		
<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 Unit	3.568.459.077		<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 Unit	3.568.459.077		



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Org	3.568.459.077	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Org	3.568.459.077		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Keg			0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Keg			0		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	Unit	542.827.378	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	Unit	542.827.378		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Jenis	5.291.913	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Jenis	5.291.913		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Unit	130.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Unit	130.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	251.220.445	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	251.220.445		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6.315.020	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6.315.020		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	150.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	Unit	738.756.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	Unit	738.756.080		



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.060.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.060.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	310.696.080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	310.696.080		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	425.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	425.000.000		
<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD			137.840.320	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD			137.840.320		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	71.110.320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	71.110.320		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Item	11.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Item	11.730.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	55.000.000		
<u>Penataan Organisasi</u>	Jumlah Unit Kerja Internal			35.000.000	<u>Penataan Organisasi</u>	Jumlah Unit Kerja Internal			35.000.000		
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	35.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	35.000.000		



PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP el	99%	%	494.400.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP el	99%	%	494.400.000		
	Persentase Anak yg Memiliki KIA	55%	%			Persentase Anak yg Memiliki KIA	55%	%			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4	Jenis	370.800.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4	Jenis	370.800.000		
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5	Dokumen	77.250.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5	Dokumen	77.250.000		
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	#####	Dokumen	200.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	#####	Dokumen	200.000.000		
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	Laporan	93.550.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	Laporan	93.550.000		
Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	46.350.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	46.350.000		
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5	Jenis	46.350.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5	Jenis	46.350.000		
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	Laporan	46.350.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	Laporan	46.350.000		
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	46.350.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	46.350.000		



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	30.900.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	30.900.000		
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	30.900.000	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	30.900.000		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Anak 0 - 18 Th yg memiliki Akta Kelahiran	95	%	499.550.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Anak 0 - 18 Th yg memiliki Akta Kelahiran	95	%	499.550.000		
	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan atas peristiwa perkawinan yang dilaporkan	100	%			Persentase Penerbitan Akta Perkawinan atas peristiwa perkawinan yang dilaporkan	100	%			
	Persentase Penerbitan Akta Kematian atas peristiwa Kematian yang dilaporkan	100	%			Persentase Penerbitan Akta Kematian atas peristiwa Kematian yang dilaporkan	100	%			
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan	4 Jenis		293.550.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan	4 Jenis		293.550.000		
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	Dokumen	200.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	Dokumen	200.000.000		
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	21	Laporan	93.550.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	21	Laporan	93.550.000		
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencapil	1	Laporan	175.100.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencapil	1	Laporan	175.100.000		



Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2	Laporan	26.050.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2	Laporan	26.050.000		
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2	Laporan	10.000.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2	Laporan	10.000.000		
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2	Laporan	36.050.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2	Laporan	36.050.000		
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	46.350.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	46.350.000		
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	46.350.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	46.350.000		



Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	Dokumen	10.300.000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	Dokumen	10.300.000		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	Laporan	30.900.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	Laporan	30.900.000		
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan	30.900.000	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan	30.900.000		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Adminduk melalui PKS	5	OPD	319.300.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Adminduk melalui PKS	5	OPD	319.300.000		
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan yang akurat	1	Laporan	92.700.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan yang akurat	1	Laporan	92.700.000		
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1	Dokumen	46.350.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1	Dokumen	46.350.000		
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	OPD	46.350.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	OPD	46.350.000		
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1	Laporan		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1	Laporan			
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	1	Laporan	-	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	1	Laporan	-		



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	1	Laporan	180.250.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	1	Laporan	180.250.000		
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	41.200.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	41.200.000		
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5	Dokumen	46.350.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5	Dokumen	46.350.000		
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	92.700.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	92.700.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	21	Unit	46.350.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	21	Unit	46.350.000,00		
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	46.350.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	46.350.000		
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Penduduk Tk Kabupaten	100	%	26.817.904	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Penduduk Tk Kabupaten	100	%	26.817.904		
Penyusunan Profil Kependudukan	Jml Dokumen Profil Kependudukan	1%	Dokumen	26.817.904	Penyusunan Profil Kependudukan	Jml Dokumen Profil Kependudukan	1%	Dokumen	26.817.904		
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	35	Buku	26.817.904	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	35	Buku	26.817.904		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

Tabel T.C 32
Usulan Program dan Kegiatan
Hasil Musrenbang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
			-	-	-

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka sinkronisasi sasaran pembangunan dari tingkat pusat dan provinsi, maka dilakukan penelaahan pada Renstra KLHK dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, tujuannya adalah agar tidak menyimpang dari koridor sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

No	Sasaran Renstra KL Ditjen Dukcapil	Sasaran Renstra DKPS Prov Kaltara	Sasaran Renstra DKPS Kab Nunukan
1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ketersediaan data Adminduk	• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat • Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dengan perjanjian kerjasama
2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berikut merupakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara beserta indikator kinerjanya

N0	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2026
1.	Mengoptimalkan Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan kepada Masyarakat oleh Dinas Kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kependudukan	88,20%



		1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98%
		2 Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh OPD di Lingk PemDa Kab Nnk	persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	40%
		3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dinas kependudukan dna pencatatan sipil	Predikat SAKIP PD	B

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan Pada tahun 2026 sesuai dengan Permendagri 050_5889 Tahun 2021 terdiri dari 5 program dan 16 kegiatan serta 38 Sub Kegiatan sebagai berikut :



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE KENSIHA DIY	REALISASI CAPAIAN RENTA DIY TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA DIY TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANKA PENDANAAN						KELOMPOK SASAKAN	PRAKIRAAN MAJU KENCANA TAHUN 2027		PRAKIRAAN DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGERTIAS			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					0,00								7.000.400.000,00	
							0,00								7.000.400.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG ISAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													7.000.400.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													7.000.400.000,00	
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NUNUKA	-	-			-	0,00						-	7.375.200.000,00	
	2.12.01.2.01	Pencatatan, Pengembangan, dan Evaluasi Kecamatan Peringkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	54.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah					2 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		12.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaksanaan Kinerja SKPD					1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		7.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah					6 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		34.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	5.400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					34 Orang/bulan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		5.400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kependudukan Peringkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA DAU	REALISASI CAJAIAN KENJA DAU TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAJAIAN TARGET KENJA DAU TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANCAN PENDANAAN						KELOMPOK SASAHAN	PRAKIRAAN MAJU KENCANA TAHUN 2027		PENCANGKAT DAHILIAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROMOTIAS			TARGET	PAGU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAKAM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-		66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan													
	2.12.01.2.05	Administrasi Umum (Peningkatan Daerah)	-	-			-	0,00			-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-	-	650.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0001	Pemeliharaan Komponen Instalasi Laboratorium Bangunan Kantor					1 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Laboratorium Bangunan Kantor yang Disediakan													
	2.12.01.2.05.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Peningkatan Kantor					2 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan													
	2.12.01.2.05.0004	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor					3 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	2.12.01.2.05.0005	Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan													
	2.12.01.2.05.0009	Pemeliharaan Peralat Koordinasi dan Komunikasi SIPIL					10 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Peralat Koordinasi dan Komunikasi SIPIL													
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemertanah Unsur	-	-			-	0,00			-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
	2.12.01.2.08	Pemeliharaan Jasa Pemungutan Unsur Pemertanah Unsur	-	-			-	0,00			-	Peningkataan Tala Kelola Pem. wilayah	-	-	1.025.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA 5 TAHUN	REALISASI CAPAIAN KINERJA 5 TAHUN 2024	PRAKTIK CAPAIAN KINERJA 5 TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KELOMPOK PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAIRY PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAKRAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	0,00						-	102.500.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-	-	134.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				1 Layanan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-		134.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-	-	49.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0005	Hasil Realisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			0				0,0	0,00	-	-	-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-		49.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	0,00						-	110.100.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Pelayanan Dukungan Kependudukan	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-	-	110.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-		110.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Hasil Realisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Realisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola (Peningkatan)	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	0,00						-	0,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERHODE RENSIHA DPO	REALISASI CAPAIAN RENTAN DPO TAHUN 2024	PRAKTIK CAPAIAN RENTAN DPO TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU KENCANA TAHUN 2027		PRAKTIK PENDANAAN
							TARGET 2025	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROMOTAS			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kecamatan Kecamatan	-	-	0,00	DINAS KEPEND DAN PENCATAT
	2.12.05.2.01.002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang terbentuk				2 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kecamatan Kecamatan	-		0,00	DINAS KEPEND DAN PENCATAT
			JUMLAH					0,00							7.888.400.000,00	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini disusun sesuai dengan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistic dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan , aspek ekonomi dan aspek keamanan. Untuk itu maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang dapat kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan